



The Islamic Education Policy in Public Junior High Schools

Irma Suryani*¹, Darimus², Asmuri³, Dina Fitri⁴

irmas6614@gmail.com, asmuri@uin-suska.ac.id, darimus@uin-suska.ac.id, Diinafitri8@gmail.com

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to analyze how Islamic education policies in Junior High Schools are designed, implemented, and evaluated in the context of the Independent Curriculum and attempts to identify supporting and inhibiting factors for the implementation of the policy. This study uses Library Research with a qualitative approach. Islamic education policies in Junior High Schools have a strategic role in shaping a generation that is faithful, pious, and has noble character. The implementation of policies in the context of the Independent Curriculum provides an opportunity to integrate Islamic values into the learning process flexibly and contextually. Through effective policies, schools can create an educational environment that supports the development of students' Islamic character, both through strengthening the curriculum, religious activity programs, and social interactions based on Islamic values. The supporting factors for the successful implementation of Islamic education policies in Junior High Schools are a flexible curriculum, teacher competence, parental support, and adequate facilities. Meanwhile, the challenges are limited resources, lack of relevant teaching materials, and the influence of globalization which greatly demands adaptive and innovative strategies so that they can provide maximum impact. So that strategic steps are needed in the future with synergy between the government, schools, parents and the community need to be improved to optimize the implementation of this policy. If all parties have coordinated well, this policy is relevant to the needs of students and is able to produce a generation that excels academically, has an Islamic character, and is ready to face global challenges.

Kata Kunci: Independent Curriculum; Islamic Education Policy; Junior High School

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia, karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu negara dapat meningkat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan (Putra & Aman, 2020). Kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan moral generasi muda, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menjadi penting, mengingat tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan individu yang berilmu dan berakhlak mulia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendidik siswa agar memiliki pengetahuan agama yang mendalam, memahami ajaran Islam dengan baik, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral dan spiritual yang kokoh. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), peserta didik berada dalam fase perkembangan yang krusial, di mana nilai-nilai agama menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepribadian dan moralitas mereka. Kebijakan pendidikan Islam di SMPN menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung tercapainya tujuan ini, melalui integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum, program ekstrakurikuler, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Namun, implementasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat SMPN sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran, serta pengaruh era globalisasi yang membawa berbagai nilai baru yang terkadang tidak selaras dengan prinsip Islam. Selain itu, keberagaman latar belakang sosial budaya peserta didik juga menuntut kebijakan pendidikan Islam yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika tersebut.

Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di Indonesia menawarkan peluang untuk mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam penguatan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melalui pendekatan ini, kebijakan pendidikan Islam dapat lebih efektif dalam menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam di SMPN dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks Kurikulum Merdeka. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMP sebagai langkah strategis dalam mencetak generasi yang berakhlak karimah

Penelitian ini secara khusus akan membahas implementasi kebijakan Pendidikan Islam di SMP Negeri, dengan fokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan pelatihan guru untuk membentuk karakter siswa. Batasan penelitian ini mencakup sekolah negeri sebagai ruang lingkup utama, sehingga hasil analisis dan rekomendasi yang diberikan relevan dengan konteks pendidikan Islam di lingkungan sekolah negeri yang memiliki keberagaman siswa baik dari segi latar belakang sosial, budaya, maupun agama..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Library Research* (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian *Library research* digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka melalui proses membaca, mencatat, dan mengolah hasil penelitian. Salah satu karakteristik utama dari penelitian ini adalah interaksi peneliti dengan data pustaka atau teks sekunder, di mana informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber tangan kedua, seperti buku referensi, bukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Setelah melakukan telaah mendalam terhadap sumber pustaka, proses dilanjutkan dengan analisis data yang meliputi tahap pemaparan data, penyortiran data, serta interpretasi data untuk disusun menjadi artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni dengan memeriksa isi dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui proses membaca, mencatat, memilah, memilih, dan menganalisis berbagai bahan bacaan, termasuk jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Menteri Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak, khususnya dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Kebijakan ini mencerminkan cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman manajerial untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu jenis kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan publik, yang merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan dirancang untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas (Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, 2020). Kebijakan dapat diartikan sebagai kerangka keseluruhan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan pendidikan Islam.

Dalam konteks Islam, istilah pendidikan umumnya merujuk pada tiga istilah, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Di antara ketiga istilah tersebut, yang paling sering digunakan dalam praktik pendidikan Islam adalah al-tarbiyah. Kata tarbiyah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata rabba, yarabu, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang (Ujud et al., 2023). Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membimbing dan mengembangkan potensi siswa, agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi bagian dari masyarakat yang merdeka. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat membawa siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya (Hidayah, 2023). Sedangkan Dalam pandangan al-Ghazali, pendidikan merupakan usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa. Tujuannya adalah agar siswa dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat (Najib & Imawan, 2022).

Menurut Depdiknas, pendidikan Islam didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini dilakukan melalui sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik, agar mereka dapat mengembangkan potensi diri sambil tetap berpegang pada pedoman Al-Qur'an dan hadis (Hidayah, 2023). Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk individu muslim yang taat beragama, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan ajaran Islam (Achmad Sudaryo, 2023).

Pendidikan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek keagamaan, moral, sosial, dan intelektual. Pada dasarnya, pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing individu agar dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh. Berbagai tingkatan pendidikan Islam dapat ditemui, mulai dari pendidikan formal di lembaga-lembaga seperti madrasah, pesantren, hingga tingkat pendidikan non-formal di masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam juga mencakup pembelajaran Al-Qur'an, hadits, fiqh (hukum Islam), akidah (teologi Islam), dan berbagai bidang ilmu lainnya yang relevan dengan ajaran Islam (Ramadhani & Musyaraph, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai keputusan atau aturan yang ditetapkan oleh pemimpin, yang kemudian dijadikan pedoman

oleh pemimpin dan seluruh anggota masyarakat dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan Islam. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, agar setiap individu dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pendidikan Islam

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam yang fokus pada pembentukan akhlak yang kokoh, kita dihadapkan pada tantangan besar di era modern ini. Berbagai perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang cepat dapat mempengaruhi nilai-nilai moral dan agama, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan akhlak mulia sesuai ajaran Islam (Ramadhani & Musyarapah, 2024).

Meskipun demikian, Islam tidak mengabaikan aspek-aspek pendidikan lainnya, seperti pengembangan akal atau bidang pengetahuan lainnya. Para ahli pendidikan Islam menekankan bahwa tujuan dari pendidikan Islam bukan hanya untuk memperkenalkan generasi muda pada pengetahuan baru, tetapi juga mencakup beberapa hal penting, antara lain: Berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental (kebaikan), mengedukasi individu untuk memahami identitas diri mereka (kebaikan), mendukung pembentukan karakter dan moral yang kuat dalam masyarakat (kesopanan), dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat yang berlandaskan pada integritas dan kejujuran (kebaikan).

Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk individu mukmin yang kokoh. "Kokoh" dalam konteks ini mencakup kekuatan fisik dan mental. Hadis-hadis yang diajarkan mengandung pesan penting tentang pentingnya pengembangan manusia yang kuat dan berkualitas, baik dari segi fisik maupun mental. Hal ini mencerminkan bahwa Islam tidak hanya mengutamakan pengembangan spiritual, tetapi juga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan ketahanan mental sebagai bagian integral dari kualitas seorang Muslim (Hadisaputra, 2021). Menurut Muhammad Athahiyah al-Abrasy, tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, yaitu pembentukan moral yang tinggi. Pendidikan moral dianggap sebagai inti dari pendidikan Islam, meskipun tidak mengabaikan aspek pendidikan jasmani, pengembangan akal, dan ilmu praktis. Dengan demikian, pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter yang mulia sebagai dasar utama, sementara aspek lainnya seperti kesehatan fisik, kecerdasan, dan keterampilan praktis tetap mendapatkan perhatian yang seimbang (Adin & Fauzi, 2024).

Menurut al-Ghazali, yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, tujuan umum pendidikan Islam tercermin dalam dua segi, yaitu: 1. Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. 2. Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. Pandangan dunia akhirat dalam pandangan al-Ghazali adalah menempatkan kebahagiaan dalam proporsi yang sebenarnya. Kebahagiaan yang lebih memiliki nilai universal, abadi, dan lebih hakiki itu lah yang diprioritaskan (Daulay et al., 2020).

Fungsi Pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar tugas-tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini memiliki tujuan yang bersifat struktural dan institusional, yaitu mendukung kelancaran proses pendidikan. Secara mikro, fungsi pendidikan Islam adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiah pada diri anak didik, sehingga mereka mampu mengaktualisasikan diri dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Sementara itu, secara makro, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan budaya dan identitas suatu komunitas, di mana manusia saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain (Afida & Elmiyah, 2024). Secara umum, fungsi pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan mengarahkan

pertumbuhan serta perkembangan peserta didik, dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya, hingga mencapai kemampuan optimal. Sementara itu, fungsi lainnya adalah menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa tugas-tugas pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan efektif (Diantoro et al., 2021).

Rahmat menjelaskan bahwa fungsi pendidikan Islam meliputi beberapa aspek penting, antara lain: (1) Memperkenalkan dan mendidik anak didik untuk meyakini ke-Esaan Allah SWT, sebagai pencipta semesta alam beserta seluruh isinya. (2) Memperkenalkan kepada anak didik apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah (hukum halal dan haram). (3) Melatih anak sejak dini agar dapat melaksanakan ibadah, baik yang berkaitan dengan *hablumminallah* (hubungan dengan Allah), *hablumminannas* (hubungan dengan sesama manusia), maupun *hablumminal'alam* (hubungan dengan alam). (4) Mendidik anak didik untuk mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau (ahlu bait), serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca Al-Qur'an. (5) Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar (Fardana et al., 2023).

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di SMPN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang dalam konteks kebijakan pendidikan berarti pelaksanaan menyeluruh dari kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi ini adalah upaya strategis untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah meresap dan membentuk karakter dirinya. Dengan kata lain, pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan yang diperlukan oleh umat manusia, sebagaimana Islam menjadi pedoman yang menyentuh setiap aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Implementasi kebijakan pendidikan merujuk pada proses yang melibatkan badan administratif dalam menjalankan program yang telah dirancang. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga dengan aspek hukum, politik, dan sosial ekonomi, yang mencakup para pelaksana program baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan kebijakan tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan tertentu. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah wujud operasional dari program yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang (Nadhiroh, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan (Kemendikbud RI, 2020). Istilah ini biasanya dikaitkan dengan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Sebagai elemen kunci dalam kebijakan, implementasi merupakan aspek yang paling penting karena menjadi penentu akhir keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, sebaik apa pun perumusan kebijakan, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Implementasi kebijakan pendidikan adalah langkah nyata untuk merealisasikan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan. Tanpa pelaksanaan, manfaat dari kebijakan tersebut tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan kebijakan ini, diperlukan tindakan administratif yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Proses implementasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pendidikan sendiri merupakan disiplin ilmu dan praktik yang bertujuan memahami permasalahan dalam kebijakan pendidikan beserta konsekuensinya. Hal ini mencakup strategi yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam masyarakat (Yuniarti et al., 2022).

Memahami kebijakan pendidikan secara menyeluruh sangat penting untuk

mengoptimalkan implementasinya. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan pendidikan adalah memperkenalkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Ali Imron menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah hasil pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai dan evaluasi terhadap situasi yang ada. Implementasi kebijakan pendidikan menjadi elemen yang paling krusial, karena melibatkan tindakan otoritas administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pendidikan. Pengetahuan mendalam tentang isi kebijakan pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan potensi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Kebijakan pendidikan, secara keseluruhan, mencakup proses dan hasil dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh lembaga pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan dalam periode waktu tertentu (Dewanti et al., 2022).

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Pendidikan Islam dalam mengembangkan karakter siswa, diperlukan revisi kurikulum, inovasi metodologi pengajaran, dan penguatan pelatihan guru. Kurikulum harus dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kasih sayang ke dalam seluruh proses pembelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran agama. Pendekatan berbasis pengalaman, seperti kegiatan sosial dan praktik ibadah yang relevan dengan kehidupan nyata, dapat membantu siswa menerapkan nilai-nilai tersebut. Dalam hal metodologi pengajaran, guru perlu menggunakan pendekatan aktif, kontekstual, dan partisipatif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus, untuk mendorong siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara langsung (SHELEMO, 2023). Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selain itu, pelatihan guru harus difokuskan pada pengembangan kemampuan mereka dalam menjadi teladan akhlak Islami dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap mata pelajaran. Program pelatihan ini perlu dilengkapi dengan mentoring dan pendampingan berkelanjutan agar guru dapat menerapkan strategi baru secara konsisten. Sistem pemantauan dan evaluasi juga harus diperkuat dengan menitikberatkan pada pembentukan karakter siswa melalui penilaian berbasis portofolio, refleksi, dan umpan balik dari orang tua. Dengan langkah-langkah ini, Pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Islami yang kokoh (Muslimin, 2023).

Materi Pendidikan Agama Islam di SMPN

Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diberikan di semua jenis, bentuk dan jenjang pendidikan sekolah (SD, SMP, SMA, SMK dan/atau yang sederajat, karena sesuai penegasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa PAI adalah isi kurikulum yang wajib diajarkan disetiapjenis, jalur dan jenjang pendidikan. Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek berikut ini: (1) Al-Qur'an dan al-Hadits yang meliputi cara menulis, cara membaca, cara menghafal, memahami makna kandungan dan menterjemahkannya. (2) Aqidah meliputi rukun iman, yaitu mengimani Allah, malaikat, kitab Allah, Nabi dan Rasul, hari kiamat serta qodo' dan qadar. (3) Akhlak meliputi mencontoh dan membiasakan berperilaku terpuji serta menghindari perilaku tercela. (4) Fiqh meliputi rukun Islam, thaharah, dzikir dan berdo'a kepada Allah. (5) Tarikh dan kebudayaan Islam meliputi sejarah Nabi dan sahabat-sahabatnya (Hatim, 2018).

Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN

Guru dalam konteks pendidikan Islam sering disebut dengan istilah "murabby" mu'allim dan mu'adib". Jadi tugas dari murabby adalah mendidik, mengasuh, dari kecil sampai dewasa, menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Pengertian guru pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan guru biasanya, yang membedakan adalah penyampaian materi pelajaran, dalam pelajaran agama Islam diharapkan anak didik kelak mampu memahami makna yang terkandung dalam ajaran Islam

secara menyeluruh, menghayati maknasanya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru pendidikan agama Islam harus mempunyai sifat-sifat yaitu: ikhlas, tawadhu', jujur, adil, senantiasa bersifat kasih sayang tanpa pilih kasih, pemaaf serta menguasai materi pelajaran. Apabila sifat-sifat tersebut dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Adapun syarat-syarat guru Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (1) Memiliki kelayakan akademik seperti gelar dan ijazah sertad dukung oleh kualifikasi diri yang unggul dan professional, (2) Memiliki kesehatan jasmani dan roh, (3) Menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. (4) Memiliki kepribadian yang tinggi yang dihiasi dengan akhlak mulia dalam segala perilakunya. (6) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam di SMPN

Pendidikan agama Islam di SMP telah lama menjadi isu yang kompleks dalam pelayanan publik sejak masa awal kemerdekaan. Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa agama dalam pengajaran di sekolah khususnya di SMP merupakan persoalan klasik yang terus menghadirkan tantangan. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Agama Islam (PAI) dari masa awal kemerdekaan yang dikenal sebagai era Orde Lama hingga saat ini menunjukkan adanya berbagai perubahan. Berikut akan diuraikan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Islam, mencakup pendidikan agama di sekolah dan madrasah (Nadhiroh, 2021). Evaluasi kebijakan bisa ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan, atau untuk mengetahui kebijakan pendidikan dijalankan dan meraih manfaat yang diinginkan.

Dalam bahasa sederhana, evaluasi kebijakan pendidikan untuk menilai "manfaat" dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Atas dasar itulah, evaluasi kebijakan pendidikan bisa diarahkan pada tiga komponen; 1) administratif, yaitu mengukur prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, biasanya lebih pada aspek finansial; 2) yudisial; yaitu mengukur objek-objek hukum, yang mungkin di langgar atau tidak di langgar; 3) politik, yaitu mengukur pertimbangan politik dari kebijakan pendidikan itu. Hal senada diungkapkan Lester dan Stewart dijelaskan bahwa, evaluasi kebijakan pendidikan bisa dibedakan dalam dua tegas yang berbeda, 1) menentukan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan dengan cara menggambarkan dampaknya, 2) untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Lester dan Stewart (Azizah et al., 2023).

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran PAI di SMPN

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN berbasis Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang rukun iman serta mampu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan benar dan penuh kesadaran, seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Selain itu, mereka didorong untuk menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah SWT (akhlak kepada Allah), sesama manusia (akhlak kepada sesama), maupun lingkungan (akhlak kepada alam) (Rosanita, 2016).

Dalam aspek literasi Al-Qur'an dan Hadis, siswa diharapkan mampu membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis pilihan yang relevan dengan akhlak, ibadah, dan kehidupan sosial. Pada dimensi sejarah dan kebudayaan Islam, peserta didik juga diajak untuk mengenal, menghargai, dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta menerapkan nilai-nilai perjuangan Islam dalam kehidupan modern. Selanjutnya, Kurikulum Merdeka juga menekankan pada

pengembangan keterampilan sosial dan muamalah, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami konsep adab dalam bermuamalah, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Mereka dilatih untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, khususnya melalui kegiatan seperti zakat, infak, dan sedekah, yang mencerminkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. Kurikulum ini juga mendorong peserta didik untuk memiliki semangat belajar sepanjang hayat, meningkatkan pemahaman agama, dan menghadapi tantangan era modern dengan nilai-nilai Islam yang kuat (Afiyah, n.d.).

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup adanya kurikulum yang terstruktur seperti Kurikulum Merdeka, yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran. Dukungan dari pihak sekolah, seperti kepala sekolah dan guru yang kompeten dalam mengajarkan Pendidikan Agama Islam (PAI), juga menjadi elemen kunci. Selain itu, lingkungan sekolah yang kondusif, fasilitas pendukung seperti masjid atau ruang khusus pembelajaran agama, serta keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung pendidikan keislaman anak-anak mereka, turut memperkuat implementasi kebijakan ini.

Namun, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas pendidik yang mampu mengajarkan nilai-nilai Islam secara mendalam dan relevan dengan kehidupan siswa. Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya bahan ajar yang kontekstual dan menarik, juga menjadi hambatan. Selain itu, pengaruh globalisasi dan modernisasi dapat membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menyulitkan penerapan kebijakan di tengah keberagaman latar belakang sosial budaya siswa. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah guna memastikan kebijakan pendidikan Islam di SMP dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan pada pembentukan karakter siswa.

Untuk meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Islam (PAI) dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum yang lebih fleksibel, pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Guru PAI perlu dilatih untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti akhlak, tauhid, dan ibadah, dalam berbagai mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada pelajaran agama. Pelatihan ini harus mencakup strategi untuk menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam konteks mata pelajaran lain, misalnya melalui pendekatan pembelajaran lintas kurikulum yang menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan materi pelajaran seperti matematika, sains, atau sejarah. Selain itu, guru PAI juga perlu diberi pelatihan dalam merancang kurikulum berbasis nilai-nilai Islam, yang menggabungkan pengajaran agama dengan pendidikan karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Pelatihan untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif juga sangat penting, mengingat keberagaman kebutuhan dan latar belakang siswa (Nurarfiansyah et al., 2022).

Guru perlu dilatih dalam metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan teknologi pembelajaran, flipped classroom, atau pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tak kalah penting, guru juga harus mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka sebagai teladan dalam menerapkan akhlak dan nilai Islam, agar mereka dapat menginspirasi siswa melalui tindakan nyata, bukan hanya teori. Pelatihan semacam ini akan membantu guru untuk lebih efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan

tuntutan zaman (Safarudin & Anshory, 2018).

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Implementasi kebijakan ini, khususnya dalam konteks Kurikulum Merdeka, memberikan peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembelajaran secara fleksibel dan kontekstual. Melalui kebijakan yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan karakter Islami peserta didik, baik melalui penguatan kurikulum, program kegiatan keagamaan, maupun interaksi sosial yang dilandasi nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMPN dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti kurikulum yang fleksibel, kompetensi guru, dukungan orang tua, serta fasilitas yang memadai menjadi modal penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Sebaliknya, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya bahan ajar yang relevan, serta pengaruh globalisasi menuntut strategi yang adaptif dan inovatif untuk memastikan kebijakan pendidikan Islam dapat memberikan dampak yang maksimal. Sebagai langkah strategis ke depan, sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Dengan demikian, kebijakan ini dapat terus berkembang menjadi instrumen yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan siswa di era modern, tetapi juga mampu mencetak generasi yang unggul secara akademik, berkarakter Islami, dan siap menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sudaryo. (2023). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1>
- Adin, A. M., & Fauzi, S. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Generasi Islami. *Tsaqofah*, 4(2), 839–847. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2590>
- Afida, N., & Elmiah, T. (2024). 3362-3369. 4, 3362–3369.
- Afiyah, L. (n.d.). *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DAN MADRASAH Islamic Religious Education in the Implementation of Independent Curriculum at Schools and Madrasah*. 13(2), 152–159.
- Azizah, N. N., Meysihinur, & Aziza, M. (2023). Volume 2, No 2, 2023. *Ta'Lim*, 2(2), 13–27.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Wibowo, G., & Lubis, J. I. (2020). Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 136–150.
- Dewanti, E. N., Setiawan, F., Tobasa, M. R., & Ediansyah, P. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Anwarul*, 2(4), 316–324. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494>
- Diantoro, F., Purwati, E., & Lisdiawati, E. (2021). Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Dimasa Pandemi Covid-19. *MA'ALIM: Jurnal*

- Pendidikan Islam*, 2(01), 22–33. <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i01.3035>
- Fardana, S. F., Rasyid, M. W., & Jayanti, I. M. (2023). Analisis Posisi Landasan Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Standar Pendidikan Nasional. *Masaliq*, 3(6), 1019–1030. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i6.1568>
- Hadisaputra. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Wikipedia*, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- Hatim, M. (2018). Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 140–163. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.265>
- Hidayah, H. H. (2023). Pengertian , Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam. *Jurnal As-Said*, 3(1), 21–33. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/141>
- Muslimin, I. (2023). Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus Di Madrasah Se-Jawa Timur. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 31–49. <https://doi.org/10.56013/fj.v3i1.2010>
- Nadhiroh, U. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era New Normal Terhadap Pembentukan Akhlak Peserta Didik. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 4(2), 152–164. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/view/20540>
- Najib, M. A., & Imawan, D. H. (2022). Dinamika Intelektual dan Peradaban Islam pada Masa Rasulullah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 105. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.12527>
- Nurarriansyah, L. T., Kholizah, N. A., Sani, D. A., Sembiring, D. F. Y., Ramadhani, P. S., Dermawan, M. M., Oktaviani, D., & Nasution, I. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Edupedia*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/10.24269/ed.v6i2.1489>
- Putra, E., & Aman, A. (2020). *Quality Analysis of Feasibility of Contents of Class XI High School History Text Books Published by Erlangga, Grafindo, and Yudhistira Curriculum 2013*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302414>
- Ramadhani, N., & Musyarapah. (2024). Tujuan Pendidikan Islam dalam Membentuk Generasi Berakhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 3(2), 78–91. <https://doi.org/10.55080/jpn.v2i2.88>
- Rosanita, D. (2016). Analisis Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 28–39. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v1i1.4>
- Safarudin, R. V., & Anshory, I. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Smp Muhammadiyah Waipare Kabupaten Sikka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(2), 175–186. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp>
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Covid 19.

Jurnal Mappesona, 2(1).

SHELEMO, A. A. (2023). Konsep Integrasi Pendidikan Jasmani dan Rohani Dalam Pendidikan Islam. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Bioedukasi*, 6(2), 337–347. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>

Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 182–207. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1162>